

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan selektivitas imigrasi Amerika Serikat pada era Donald Trump terbentuk dan apa implikasinya terhadap struktur ekonomi, khususnya pasar tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kebijakan tersebut tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi objektif, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara preferensi aktor domestik, konstruksi persepsi terhadap migrasi, serta kebutuhan negara untuk mempertahankan legitimasi politik.

Dalam perspektif *political economy of migration*, migrasi merupakan bagian integral dari struktur ekonomi Amerika Serikat. Tenaga kerja migran berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor, terutama sektor blue-collar seperti konstruksi, pertanian, dan jasa, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap pekerja migran. Selain itu, migran juga berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto, konsumsi, serta penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, ekonomi Amerika Serikat memiliki kebutuhan yang berkelanjutan terhadap keberadaan tenaga kerja migran.

Namun demikian, dalam proses perumusan kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi aktor domestik memainkan peran yang lebih

dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi rasional. Mengacu pada kerangka liberalisme Andrew Moravcsik, kebijakan negara mencerminkan agregasi kepentingan domestik yang terbentuk dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, preferensi tersebut tidak hanya berasal dari aktor ekonomi seperti sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga dari aktor ideational yang membentuk persepsi migrasi sebagai ancaman, serta aktor politik yang berupaya mempertahankan dukungan elektoral. Persepsi mengenai job scarcity dan wage suppression kemudian menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk mengadopsi kebijakan yang lebih restriktif terhadap migrasi.

Lebih lanjut, kebijakan selektivitas imigrasi yang diimplementasikan melalui perluasan penegakan hukum, termasuk peran aparat seperti ICE, menunjukkan bahwa negara merespons tekanan domestik dengan memperkuat kontrol terhadap arus migrasi. Namun, temuan empiris dalam penelitian ini justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi kebijakan dan realitas di lapangan. Alih-alih mengurangi tekanan di pasar tenaga kerja domestik, pembatasan migrasi justru berkontribusi terhadap kekurangan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu yang sangat bergantung pada pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena job scarcity tidak terjadi secara merata, bahkan dalam beberapa kasus kebijakan tersebut memicu disrupsi terhadap keseimbangan pasar tenaga kerja.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep liberal paradox yang dikemukakan oleh James Hollifield, di mana negara menghadapi dilema antara kebutuhan untuk mempertahankan keterbukaan ekonomi dan tekanan untuk melakukan pembatasan migrasi demi kepentingan politik domestik. Dalam penelitian ini, paradoks tersebut terlihat jelas: di satu sisi, ekonomi Amerika Serikat membutuhkan tenaga kerja migran untuk menjaga produktivitas dan pertumbuhan, sementara di sisi lain, negara menerapkan kebijakan restriktif sebagai respons terhadap tekanan politik dan persepsi publik. Dengan demikian, kebijakan selektivitas imigrasi tidak sepenuhnya mencerminkan rasionalitas ekonomi, melainkan merupakan hasil dari ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan legitimasi politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada era Donald Trump merupakan manifestasi dari interaksi antara faktor ekonomi, ideational, dan politik dalam tingkat domestik. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial terhadap migrasi serta dinamika politik internal. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan imigrasi perlu dilakukan secara multidimensional, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan peran persepsi dan politik dalam membentuk arah kebijakan negara.

#### 4.1. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan imigrasi di masa depan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan selektivitas migrasi yang berbasis pada kontribusi ekonomi tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan dalam sistem migrasi internasional. Meskipun pertimbangan ekonomi merupakan faktor penting dalam kebijakan imigrasi, pembatasan yang terlalu ketat terhadap jalur migrasi non-ekonomi berpotensi mengabaikan kewajiban moral dan hukum internasional terhadap kelompok migran yang membutuhkan perlindungan.

Kedua, kebijakan imigrasi berbasis investasi dan monetisasi migrasi sebaiknya dirancang dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak hanya menjadi instrumen pemasukan finansial bagi negara, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan imigrasi tidak hanya menguntungkan negara secara fiskal, tetapi juga dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.